

***Multiplier Effects* dari Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Maritim untuk Memacu Timbulnya Daya Saing, Inklusifitas Ekonomi, Berorientasi Rakyat, Berpusat pada Rakyat**

Abstrak

Pusat Studi ASEAN Universitas Pattimura Ambon

ASEAN Economic Community memberikan kesempatan dan akses yang luas bagi negara-negara yang siap dalam menghadapi penerapan sistem liberalisasi dalam sistem perekonomiannya baik di bidang perdagangan, barang dan jasa, serta investasi maupun pergerakan sumber daya manusia trampil. Terlebih dalam menghadapi penguatan integrasi masyarakat ASEAN Tahun 2025 maka dibutuhkan kemampuan berkompetisi dan *political will* pemerintah dalam menghadapi tantangan dan sekaligus meraih peluang secara bersamaan. Bagi Indonesia sendiri, bukan saja dibutuhkan gerak cepat dalam setiap langkah strategis yang menjadi kebijakan nasional agar dapat mengantisipasi dan memastikan kesiapan Indonesia menjemput dan merefleksi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, namun juga harus mampu mengimbangnya dengan mengartikulsikan kebijakan tersebut selama satu dekade mendatang (2016-2025) secara tepat kepada rakyat karena pengalaman selama pencapaian AEC 2015 lalu memberikan kesan rakyat kurang siap dan tidak peka dalam menghadapi penerapan sistem liberalisasi. Sementara pemerintah berjalan begitu cepat sehingga disadari atau tidak mengabaikan perkembangan dalam lingkup domestik.

Visi ASEAN harus menjadi fokus yaitu mewujudkan ASEAN yang berlandaskan pada aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat. Konsolidasi pembangunan dan penguatan integrasi ASEAN 2025 terkandung amanat untuk meningkatkan standar hidup rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan. Karena itu korporasi dan investasi mestinya mampu mendistribusikan pendapatan dan kesempatan kerja secara merata kepada rakyat (berorientasi pada rakyat) sehingga dapat mengatasi disparitas ekonomi di negara-negara ASEAN.

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas dapat menimbulkan *multiplier effects*, salah satunya bagi kemampuan daya saing korporasi dan keunggulan investasi, serta dapat menjadi stimulus untuk membuka keterisolasian dan memacu perkembangan industri lokal terutama di bidang pengolahan sumber daya kelautan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini harus diikuti langkah strategis berupa rencana aksi bagi pengembangan UMKM agar memiliki pertumbuhan produktifitas tinggi. Selain itu pemerintah harus mendorong kemandirian, penciptaan dan penerapan pengetahuan secara praktis, kebijakan yang mendukung inovasi kreatif, memperbanyak riset tentang energi terbarukan dan teknologi hijau, pemajuan tata kelola yang baik di segala bidang, regulasi yang transparan dan responsif; penyelesaian sengketa yang efektif; serta pemahaman mengenai peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global. Semuanya ini harus menjadi konsent bersama baik para pemangku kepentingan, pelaku usaha, maupun masyarakat luas di Indonesia.

Secara makro, komitmen dalam ambisi politik untuk bekerjasama intra ASEAN maupun dengan mitra wicara ASEAN diharapkan dapat turut membawa ke arah perubahan masa depan Indonesia yang lebih maju.

Di tingkat regional negara dengan jumlah penduduk terbanyak diharapkan menjadi *leader* untuk mewujudkan masa depan ASEAN yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, bertanggungjawab secara sosial dan berlandaskan pada aturan, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat.

ISI

Untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil, maka peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkereta apian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, sarana komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan menjadi tuntutan pembangunan di negara-negara ASEAN. Untuk menopang semua ini pada 27 Mei 2011, Pemerintah Indonesia meluncurkan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan *Groundbreaking* sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur. MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Kemudian pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo disempurnakan dengan program Nawacita. Inilah cara Indonesia mengejar ketertinggalannya dari negara-negara mapan yang ada di kawasan ASEAN yaitu dengan memberikan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur dan membangun konektivitas maritim. Skala prioritas ini dibuat dengan harapan agar dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai target pencapaian maksimal untuk peningkatan ekonomi Indonesia dalam lima tahun kedepan.

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim menimbulkan *multiplier effects* pada perkembangan dan pemajuan berbagai sektor ekonomi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I tahun 2017 berada di angka 5,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal I tahun 2016 di kisaran 4,92 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal IV tahun 2016 yang sebesar 4,94 persen. Meskipun diakui terlihat adanya peningkatan namun sesungguhnya masih jauh dari harapan Presiden Joko Widodo sebagaimana pidatonya pada KTT ASEAN di Myanmar tahun 2014 lalu yang mengharapkan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 7 persen.

Atas prestasi yang dicapai, Bank Dunia tetap memberikan apresiasi positif dengan menyebutkan dalam laporan *Doing Business* Bank Dunia, bahwa peringkat Indonesia naik dari

106 pada tahun 2016 menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara dengan tingkat kenaikan terbesar.

Terlepas dari semua itu, Indonesia masih butuh kerja keras untuk menghadapi penguatan integrasi masyarakat ASEAN 2025. Langkah-langkah strategis untuk mengimplementasi kebijakan nasional agar negara-negara ASEAN juga Indonesia tidak menjadi penonton atau menjadi pasar semata, namun justru harus lebih percaya diri menjadi bagian penting dari rantai produksi regional bahkan global.

Adapun langkah-langkah strategis masing-masing negara dengan keunggulan sumber daya alam khususnya Indonesia sebagai negara kepulauan dapat berupa:

A. Melakukan Penataan Sektor Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan, Pengembangan Kapasitas Industri Domestik, dan Pemberdayaan UMKM agar Memiliki Produktifitas Tinggi

- 1) Penguatan sektor perikanan dan kelautan Provinsi Kepulauan, sosialisasi dan pendampingan kepada industri domestik, serta bidang UMKM dalam mengakses jasa perbankan;
- 2) Meningkatkan mutu produk yang berkualitas;
- 3) Menumbuhkan kemandirian, menciptakan dan menerapkan pengetahuan secara praktis dalam management pengelolaan usaha dan, meningkatkan jiwa *sociointerprenership*;
- 4) Melakukan sertifikasi produk;
- 5) Kebijakan anggaran yang berpihak pada penguatan sektor perikanan dan kelautan provinsi kepulauan, industri domestik, dan UMKM untuk pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pengusaha lokal, dan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- 6) Memperluas konektivitas dan kerjasama sektoral secara regional dan global dengan membuka jaringan untuk mempromosikan produk berkualitas dan melakukan intervensi usaha melalui prospek usaha kepada para investor

B. Kebijakan yang Mendukung Inovasi Kreatif

- 1) Mendukung teknologi digital sebagai daya ungkit untuk meningkatkan perdagangan dan investasi;
- 2) Menyediakan *platform* bisnis berbasis elektronik;

- 3) Menaikkan rantai nilai global (*Global Value Chain/GVCs*) ke industri manufaktur dan jasa yang berteknologi tinggi dan padat karya dan padat pengetahuan;
- 4) Memperbanyak riset dan inovasi tentang energi terbarukan dalam agenda pembangunan yang berkesinambungan melalui penggunaan energi ramah lingkungan dan teknologi hijau serta memfasilitasi penerapannya.

C. Pemajuan Tata Kelola yang Baik di segala Bidang,

- 1) Membuat regulasi yang transparan dan responsif;
- 2) Merampingkan dan menyederhanakan rezim peraturan administrasi, persyaratan dokumentasi, serta prosedur impor dan ekspor, termasuk prosedur; mempercepat langkah penghapusan hambatan non-tarif; standarisasi dan penyesuaian, misalnya penyetaraan peraturan teknis, harmonisasi standar, penyesuaian dengan standar internasional dan *mutual recognition arrangements* (MRAs); dan penyederhanaan prosedur, dan pengurangan persyaratan untuk pengurusan sertifikat, izin dan lisensi ekspor impor dan lain-lain;
- 3) Mempelajari dengan seksama *National Trade Repositories* dan *ASEAN Trade Repositories* serta mengoperasikannya secara efektif untuk meningkatkan kepastian dan transparansi regulasi bagi sektor swasta di kawasan;
- 4) Menerapkan praktik regulasi yang baik (*good regulatory practice/GRP*) dalam mengimplementasikan praktik dan peraturan domestik sehingga meminimalkan biaya kepatuhan untuk memenuhi persyaratan NTM.

D. Mengajak secara aktif keterlibatan swasta, organisasi berbasis masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar lebih siap merefleksikan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025

- 1) Meminimalkan beban regulasi NTMs yang tidak perlu bagi sektor swasta;
- 2) Mengeksplorasi cara-cara alternatif dalam menangani NTMs seperti pendekatan sektoral dan pendekatan rantai nilai (*value chain*) terhadap NTMs;
- 3) Mewujudkan *public-private partnership* (ppp) dalam kerja kolaborasi antara Pemda dengan pihak swasta guna dapat meningkatkan daya saing daerah. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan promosi investasi, partisipasi dalam berbagai pameran dagang, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif,

meningkatkan peran efektivitas birokrasi, dengan penyediaan pelayanan prima *one stop service* untuk mempermudah perijinan investasi dan perijinan lainnya.

ANALISA

Dari paparan di atas tentang upaya Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Maritim yang berorientasi pada rakyat maka perlu dijabarkan dalam landasan aturan yang jelas dengan program aksi oleh pemangku kepentingan melalui :

A. Pengembangan Kapasitas Industri Domestik dan Pemberdayaan UMKM agar memiliki Produktivitas Tinggi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun industri domestik merupakan tulang punggung dari perekonomian bangsa. UMKM menyediakan 97,2% lapangan kerja di Indonesia, namun kontribusi mereka pada PDB hanyalah 58%. Demikianpun peran industri domestik (manufaktur) juga masih rendah. Bagi pelaku usaha industri perikanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan harus melakukan moratorium perijinan karena praktek *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) yang marak di laut Indonesia. Banyak kapal *eks asing* kenyataannya masih dimiliki oleh asing (perubahan bendera kapal menjadi bendera Indonesia ditenggarai hanya untuk mengelabui petugas). Sektor perikanan harus menjadi sektor unggulan yang berbasis pada masyarakat nelayan dan menjadi tumpuan pertumbuhan PDB nasional mengingat Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang mata pencaharian terbesar masyarakatnya adalah nelayan. Apalagi pada wilayah-wilayah perikanan tersebut terkenal memiliki *mega biodiversity*, kaya akan keanekaragaman hayati.

Provinsi Maluku dan 7 (tujuh) Provinsi kepulauan lainnya di Indonesia, secara geografis, geopolitik maupun geoekonomi memposisikan laut sebagai salah satu situs inti dalam jaringan populasi sumber daya perikanan dan kelautan nasional bahkan di dunia. Potensi sumber daya perikanan khususnya Provinsi Maluku mencapai 26,52 persen dari potensi perikanan nasional setiap tahunnya. Selama ini telah menjadi penyumbang teratas bagi peningkatan PDB nasional Indonesia. Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada akhir 2015 ketika pertumbuhan ekonomi melambat, justru pertumbuhan PAD sektor ini mencatat angka yang tertinggi yaitu sebesar 8,37%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding PDB nasional yang hanya tumbuh 4,79%.

Potensi perikanan harus menjadi modal utama pembangunan industri berbasis sumber daya kelautan dan sebagai sumber kekuatan ekonomi rakyat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat, mengingat saat ini kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dan kalah bersaing dengan nelayan-nelayan asing dan tentu yang marak terjadi di laut kepulauan Maluku ialah ilegal fishing.

Keadaan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan terutama tentang langkah dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah di bidang kelautan dan perikanan untuk menegaskan kedaulatan maritim dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan penguasa sumber daya alam harus berupaya untuk merebut kembali potensi maritim secara keseluruhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berbagai aspek perlu dibenahi baik kebijakan hingga pelaksanaan agenda pembangunan dengan tujuan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan sebagai keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

Kebijakan nasional telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono yang ingin menetapkan Provinsi Maluku sebagai “Lumbung Ikan Nasional” dan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan laut Maluku sebagai “Jalur Sutera Perdagangan Internasional” harus secepatnya diimplementasi dengan program nyata bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur pembangunan sumber daya perikanan dan kelautan serta kedaulatan maritim harus bisa dipacu untuk menjadi sentral pengembangan sektor unggulan di daerah-daerah berkarakteristik kepulauan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Proyeksi pertumbuhan PDB sampai saat ini masih belum banyak berubah. Laporan bulan Oktober masih menunjukkan 5,1% untuk tahun 2016 dan 5,3% untuk 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Negara masih butuh kerja keras untuk mendistribusikan pendapatan melalui pengembangan kapasitas industri domestik terutama perikanan dan memberdayakan UMKM karena persentasi ekspor UMKM baru berkisar 16% dari total ekspor.

Indonesia sebenarnya telah memiliki kebijakan yang cukup pro-UMKM. Berdasarkan penelitian dari ERIA mengenai *SME policy index*, kebijakan pengembangan UMKM dinilai setara dengan Thailand dan hanya kalah dari Singapura serta Malaysia. Akan tetapi masih rendahnya kontribusi UMKM terhadap PDB dan ekspor membuktikan bahwa program yang

ada perlu diredisain ulang. Permasalahan yang masih menghambat pengembangan UMKM terhitung masih cukup banyak antara lain terkait kendala pendanaan. Meski pemerintah sudah berupaya untuk memfasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan namun faktanya persentase pembiayaan kredit untuk UMKM hanya mencapai 19%. Dan hampir setengah dari pelaku UMKM di Indonesia tidak mendapat akses pembiayaan modal. Untuk itu pemerintah melalui lembaga otoritas jasa keuangan perlu untuk terus mendorong kalangan dunia perbankan nasional untuk gencar memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada UMKM agar mereka mampu mengakses kredit dan mampu menikmati manfaat dari fasilitas kredit pemerintah melalui KUR. Pembina UMKM secara lebih serius khususnya dengan meningkatkan mutu produk melalui pendidikan dan latihan di lembaga-lembaga diklat pemerintah dan swasta secara berkesinambungan, melalui upaya menumbuhkan kemandirian, penciptaan serta penerapan pengetahuan secara praktis dalam manajemen pengelolaan usaha serta menumbuhkan jiwa *sociointerprenership*. Dengan kesiapan *skill* yang baik dan terlatih serta tersedianya informasi tentang pasar maka daya saing dan keunggulan produk masing-masing negara ASEAN khususnya Indonesia dengan hasil tangkapan dan olahan perikanan mempunyai daya saing yang berkualitas di pasaran internasional.

Untuk mempertahankan mutu produk pemerintah perlu melakukan sertifikasi melalui lembaga sertifikasi nasional (SNI) yang mudah diakses agar produk berkualitas dan mampu menembus pasar ekspor sesuai kesepakatan dalam *ASEAN Trade In Good Agreement* (ATIGA), mengenai standar, *technical regulation dan Conformity Assessment Procedure*. Selanjutnya peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral secara regional menjadi faktor penting melalui perluasan jaringan produksi dan pemasaran melalui forum-forum kerjasama bilateral, regional maupun internasional terutama dengan negara mitra dagang seperti Jepang, Tiongkok, Australia yang akan mendorong integrasi kawasan yang lebih intensif.

Saat ini, perekonomian ASEAN digerakan oleh sekitar 96% unit usaha yang merupakan UMKM. Selain itu UMKM juga menyediakan lapangan kerja hingga 97%. Akan tetapi, arti penting ini belum tercermin dalam output ekonomi ASEAN. UKM hanya menyumbang 30-60% PDB di ASEAN dan 19-31% dari ekspor total ASEAN. Di Indonesia sendiri, meskipun 97,2% lapangan kerja disediakan oleh UKM, kontribusi mereka pada PDB hanyalah 58%, persentase ekspor mereka pun hanya berkisar 16% dari total ekspor. Dengan demikian diharapkan melalui *ASEAN Strategic Plan of Action for SME Development* dari

tahun 2010-2015 seharusnya sudah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi UMKM namun lemahnya konektivitas dan kerjasama sektoral yang tidak didukung oleh infrastruktur perdagangan dan komunikasi yang memadai antar negara-negara ASEAN.

B. Memperkuat Kebijakan yang Mendukung Inovasi Kreatif

Dewasa ini inovasi kreatif yang tumbuh mengikuti kemajuan teknologi digital telah membangun suatu ekonomi baru (*new economy*) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dengan memperkuat kebijakan yang mendukung inovasi kreatif maka secara tidak langsung akan menjadi daya ungkit untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Indonesia.

Upaya proaktif pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses alih teknologi dan menyediakan kebutuhan *platform* bisnis berbasis elektronik seperti jasa dan pariwisata. Negara-negara ASEAN juga Indonesia harus ditempatkan sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi besar di Asia Tenggara di tahun 2020 maka kebijakan yang mendukung inovasi sektor ini harus diperhatikan. Pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (*smartphone*) mencapai 71 juta orang, maka Pemerintah harus bisa menargetkan penciptaan 1.000 *technopreneurs* dengan valuasi bisnis sebesar 10 miliar dolar AS dan nilai *e-commerce* mencapai 130 miliar dolar AS pada 2020. Semua ini dapat dicapai apabila berbagai peraturan/ketentuan yang tidak mendorong tumbuh kembangnya *e-commerce* harus ditinjau kembali.

Peta jalan pengembangan *e-commerce* nasional yang menjadi acuan pemangku kepentingan yang telah diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur bisnis berbasis internet (*e-commerce*) seperti melalui paket kebijakan ekonomi XIV tentang Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan *E-Commerce* dan pengumuman paket XIV, diharapkan dapat mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara regional ASEAN dan global. Pemerintah juga harus yakin, bahwa peta jalan *e-commerce* ini dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru khususnya di kalangan generasi muda.

Penguatan kebijakan yang mendukung inovasi kreatif juga akan berdampak positif pada kemampuan Indonesia dalam menaikkan rantai nilai global (*Global Value Chain/GVCs*) ke industri manufaktur dan jasa yang berteknologi tinggi dan padat pengetahuan.

Inovasi kreatif dalam konteks pendekatan ilmu pengetahuan juga dapat diarahkan dalam bidang energi dan lingkungan hidup karena kebutuhan dunia akan energi yang bersih dan ramah lingkungan sedang menjadi isu internasional terkait dengan pemanasan bumi (*global warming*). Tekanan internasional akan semakin besar dimasa akan datang terhadap negara-negara yang aktivitas bisnisnya menggunakan energi dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu, maka pemerintah negara-negara ASEAN harus peka terhadap isu-isu lingkungan dengan menyediakan insentif bagi solusi atas krisis energi dengan menyediakan energi terbarukan dan penggunaan teknologi hijau yang ramah lingkungan.

Teknologi untuk menghasilkan energi dan/atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup (teknologi hijau), untuk masa datang, merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi. Kecenderungan penggunaan teknologi hijau di masa datang akan menjanjikan peluang ekonomi karena perkembangan teknologi hijau ini boleh dikatakan telah sejajar dengan teknologi informasi yang sangat memberikan margin keuntungan yang besar selama dua dekade terakhir ini.

C. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik di Segala Bidang

Salah satu ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) adalah terciptanya tata kelola regulasi yang transparan dan responsif. Terdapat tiga pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan hal tersebut yaitu negara-pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta atau biasa juga disebut sebagai *state civil society-market*. Oleh karena itu, apapun prinsip mekanisme formal yang mau diatur, haruslah mencerminkan indikator dan terdapat aturan main yang jelas, tegas dan transparan diantara ketiga pihak tersebut. Perubahan aturan main perlu diatur agar sedapat mungkin juga berpihak dan mengakomodasi kepentingan publik. Demikian pula terhadap kelompok marginal harus pula terlindungi sehingga dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi mereka.

Pemerintah juga perlu terus menerus mengevaluasi regulasi yang telah diberlakukan karena perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis sangat cepat sekali berubah. Merampingkan dan menyederhanakan rezim peraturan administrasi, persyaratan dokumentasi, serta prosedur impor dan ekspor, termasuk prosedur kepabeanan, akan merangsang tumbuhnya iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum dalam berinvestasi.

Percepatan langkah penghapusan hambatan non-tarif, harmonisasi standarisasi dan penyesuaiannya penyetaraan peraturan teknis, serta *mutual recognition arrangements* (MRAs) juga izin dan lisensi ekspor impor, akan sangat mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa dari dan ke Indonesia.

Menerapkan praktik regulasi yang baik (*good regulatory practice/GRP*) dalam mengimplementasikan praktik dan peraturan domestik akan sangat berpeluang bagi Indonesia untuk meminimalkan biaya kepatuhan untuk memenuhi persyaratan NTM ketika melakukan perdagangan regional ASEAN. Selain itu Indonesia juga perlu bekerjasama dalam mengoperasikan secara efektif *National Trade Repositories* dan *ASEAN Trade Repositories* untuk meningkatkan kepastian dan transparansi regulasi bagi sektor swasta di kawasan sehingga Indonesia dapat menjadi pelopor *the driving force* bagi kemajuan integrasi ASEAN 2025.

D. Mengajak Secara Aktif Keterlibatan Swasta, Organisasi Berbasis Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Lainnya di ASEAN.

Beberapa kebijakan yang dapat diambil untuk mengajak swasta, organisasi berbasis masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar mau terlibat secara aktif di ASEAN adalah dengan membangun kawasan-kawasan industri baru yang strategis, memperluas memberikan insentif berupa keringanan perpajakan dan kepabeanan (seperti yang telah dilakukan contohnya pengurangan atau pembebasan PPh badan, PPN, dan bea masuk), pemberian berbagai fasilitas perdagangan (contohnya pembebasan PPN atas impor dan/ atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang atau contoh lainnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan yang dilakukan oleh Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menghasilkan barang dan/atau jasa.).

Pembebasan bea masuk atas mesin serta barang tersebut dapat diberikan atas mesin serta barang dan bahan yang berasal dari Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas kawasan ASEAN, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Tempat Penimbunan Berikat.

Kebijakan lainnya yaitu mempelajari dengan cermat regulasi NTMs sehingga dapat meminimalkan beban regulasi NTMs yang tidak perlu bagi sektor swasta; dan mengeksplorasi cara-cara alternatif dalam menangani NTMs seperti pendekatan sektoral dan pendekatan rantai nilai (*value chain*) terhadap NTMs.

Public-Private Partnership (PPP), kolaborasi antara Pemda dengan pihak swasta untuk dapat meningkatkan daya saing daerah. Usaha yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan promosi investasi, partisipasi dalam berbagai pameran dagang, serta penciptaan iklim usaha dan efektivitas peran birokrasi yang optimal seperti menyediakan pelayanan *one stop service* untuk mempermudah perijinan investasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kerjasama perdagangan dan ekonomi Indonesia secara bilateral maupun regional di kawasan ASEAN harus menjadi perhatian serius pemerintah, swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk menghadapi penguatan integrasi masyarakat ASEAN Tahun 2025 maka dibutuhkan kemampuan berkompetisi dengan intra negara-negara ASEAN dan kemampuan untuk menjadi mitra penting bagi mitra wicara ASEAN.

Nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN baru hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total eksponya sehingga masih terbuka peluang yang lebar untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN dengan ditiadakan hambatan tarif dan non-tarif maka tentunya kondisi pasar demikian akan mendorong produsen dan pelaku usaha industri dan UMKM memanfaatkan peluang pasar dimaksud.

Upaya untuk memproduksi dan pendistribusian barang dan jasa sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain dibutuhkan *political will* pemerintah. Langkah strategis guna menjadi kebijakan nasional yaitu melakukan penataan sektor perikanan dan kelautan bagi provinsi kepulauan, pengembangan kapasitas industri domestik, dan pemberdayaan UMKM agar memiliki produktifitas tinggi; memperkuat kebijakan yang mendukung inovasi kreatif; dan mewujudkan tata kelola yang baik di segala bidang. Semuanya ini bisa terlaksana manakala kita mampu mengelola dengan baik *multiplier effects*

yang timbul sebagai dampak positif dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim di Indonesia.

A. Rekomendasi

Perlu memanfaatkan semua modalitas bangsa seperti keunggulan letak geografis, kondisi geopolitik maupun geoekonomi dan demografi dengan jumlah penduduk yang banyak (40% dari total penduduk ASEAN), hal ini menjadikan Indonesia mempunyai tenaga kerja potensial yang produktif, sebagai negara yang memiliki pesisir pantai yang panjang maka sumber daya perikanan dan kelautan sangat potensial. Ditunjang dengan stabilitas keamanan yang terjaga baik, maka potensi besar ini mestinya menjadi modal berharga untuk membangun industri berbasis sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan seperti Maluku.

Kehidupan masyarakat pesisir masih berada di bawah garis kemiskinan hal ini membuktikan bahwa pembangunan perikanan dan kelautan masih belum berorientasi pada rakyat. Penguatan sektor perikanan dan kelautan Provinsi Kepulauan perlu ditopang dengan kebijakan khusus dengan menerapkan desentralisasi asimetris.

Indonesia juga perlu memainkan peranan aktif di dalam berbagai forum internasional yang diikuti seperti *Agreement FAO tentang compliance with international conservations by fishing vessels on the high seas, 1963; Agreement FAO on Ports State Measures to prevent, deter and eliminate IUU Fishing 2009 ; Regional Programme of Action (RPOA) tentang IUU Fishin; UNFA (UN Fish Stock Agreement, 1995)* yang merupakan implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982; *WCPFC (West and Central Pacific Fisheries Convention, Honolulu, 2000)* sebagai implementasi dari *UN Fish Stock Agreement 1995* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan illegal fishing, termasuk masalah pengaturan *transshipment* di laut. Indonesia juga telah menjadi pihak dari *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* Konvensi tentang Pengelolaan Perikanan di Samudera Hindia di bawah naungan FAO 1993. Dalam pada itu, Indonesia juga ikut menjadi bagian dalam pengelolaan perikanan di kawasan Asia Tenggara melalui *SEAFDC (South East Asian Fisheries Development Cooperation)*.

Keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan dengan negara-negara di sekitarnya untuk mencegah *IUU Fishing*, misalnya dalam Deklarasi Bersama Presiden RI dan Presiden RRC di

Jakarta tentang “*Strategic Partnership*” tanggal 25 April 2005 yang dalam paragraf 19 menyatakan bahwa kedua negara akan memperkuat kerja sama “*Against Illegal Logging and Illegal Fishing*”, perlu untuk ditindak lanjuti dengan program aksi dan program serupa dengan negara-negara mitra lainnya. Dengan demikian penguatan integrasi masyarakat ASEAN 2025 benar-benar nantinya mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk Indonesia.

ASEAN secara kelembagaan harus mampu berperan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat negara anggotanya secara adil dan merata agar kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat diatasi.

Perlu mendorong pemanfaatan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (EDSM) dalam rangka mengantisipasi timbulnya persoalan maupun untuk menyelesaikan sengketa ekonomi, atau dengan mengembangkan pendekatan lain sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional.

Perluas konektivitas antar masyarakat, institusi, dan memberikan akses yang luas untuk memanfaatkan infrastruktur dan konektivitas maritim yang dibangun pemerintah. *Multiplier effects*-nya dapat berdampak sampai pada pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan Provinsi Kepulauan, industri domestik, dan UMKM.

Kekurangan dan kelemahan adalah suatu keniscayaan namun Indonesia harus tetap memiliki kepercayaan diri yang tinggi (*high confidence*) untuk menghadapi penguatan integrasi masyarakat ASEAN 2025 dengan memimpin dan mampu bekerjasama dalam ASEAN. Upaya intensif dan masif perlu dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan *soft skill*, dan *hardskill* masyarakat, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta melakukan transformasi cetak biru integrasi masyarakat ASEAN 2025 ke dalam hukum nasional, semuanya harus teraksekseleserasi secara dinamis dan harmonis karena bernilai strategis terhadap daya saing Indonesia dalam ajang kompetisi perdagangan Indonesia di tingkat kawasan maupun global.